

ABSTRAK

SINDY MEILASARI. 3504220070. PROFESIONALISME KERJA PEGAWAI DI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS. Pembimbing I: Lina Marliani, S.Sos., M.Si. Pembimbing II: Ari Kusumah Wardani, S.S., M.P.A.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya profesionalisme kerja pegawai di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Ciamis, yang terlihat dari proses pendisposisian surat yang berlangsung lambat, rendahnya inisiatif pegawai dalam mengatasi kendala aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), serta keterbatasan sumber daya manusia pada beberapa fungsi strategis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profesionalisme Kerja Pegawai di Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap tujuh orang informan. Penelitian ini mengacu pada empat indikator profesionalisme menurut Sedarmayanti (2017:342), yaitu kompetensi, efektivitas, efisiensi, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profesionalisme kerja pegawai BPKD Kabupaten Ciamis pada keempat indikator tersebut secara umum sudah berjalan cukup optimal, ditunjukkan oleh tingkat konsensus positif yang tinggi dari para informan pada hampir seluruh aspek yang diteliti. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa catatan kritis, antara lain variasi pemahaman individual terhadap regulasi penganggaran, keterbatasan keandalan infrastruktur SIPD yang dikelola pemerintah pusat, serta beban kerja musiman yang berdampak pada praktik lembur yang cukup ekstensif menjelang akhir tahun anggaran. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar BPKD Kabupaten Ciamis memperkuat pemerataan pelatihan kompetensi, menyusun mekanisme mitigasi risiko teknis, mengelola beban kerja secara lebih proporsional, serta mempertahankan budaya akuntabilitas dan dokumentasi kerja yang telah terbentuk dengan baik.

Kata Kunci: Profesionalisme, Kompetensi, Efektivitas, Efisiensi, Tanggung Jawab, Pengelolaan Keuangan Daerah